

Andalas Journal of International Studies



Wishnu Mahendra Wiswayana

Dinamika Permasalahan Laut Tiongkok Selatan & Tantangan Serius terhadap Ide Poros Maritim Dunia

Anita Afriani Sinulingga

Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional

Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani

Pengaruh Serangan 9/11 terhadap Perkembangan Dinamika Keamanan Internasional

Gema Ramadhan Bastari

Regionalisme Isu Lingkungan Asia Tenggara (1997-2000)

Noraini bt Zulkifli & Vivian Louise Forbes

Japan and The South China Sea

Loade Muhamad Fathun

Bencana Hutan dalam Hubungan Internasional

Andalas Journal of International Studies	Volume 5	No 1	Halaman 1-107	Padang Mei 2016	ISSN 2301-8208
------------------------------------------------	----------	------	------------------	--------------------	-------------------



**Andalas Institute of International Strategic Studies
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Andalas Journal of International Studies

ISSN : 2301 - 8208

Published by

Andalas Institute of International Studies – ASSIST

International Relations Department

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Andalas

Padang

- Editor in Chief : Sofia Trisni, Winda Ariany
- Editorial Board : Apriwan, Anita Afriani Sinulingga, Poppy Irawan
- Associate Editors : VirtuousSetyaka, HaiyyuDarmanMoenir, Rika Isnarti,
Putiviola Elian Nasir, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, Silsila Asri
- Design/ lay out : Agung Imam Zulhatta, Annisa Fitri, Dewi Putri Cornelis
- Editorial Advisory Board : Kim So-il (Busan University of Foreign Studies)
Abu Bakar Eby Hara (University Utara Malaysia, Universitas
Jember)
Philips Vermonte (CSIS Jakarta)
Arry Bainus (Universitas Padjadjaran)
Muhammad Yunus (Universitas Airlangga)
- Editorial Office : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Gedung Jurusan – FISIP Universitas Andalas, Lt. 2
Kampus Limau Manis Padang, 25163
Telp/fax: (0751)71266
- Homepage : <http://hi.fisip.unand.ac.id/assist/publication/ajis/>

Andalas Journal of International Studies (AJIS) is published twice a year. It is published by ASSIST, contains research and analytical platform dedicated to a better understanding of International issues and aims to craft the alternatives in International Studies. AJIS welcomes for papers which never been published. Summit your paper to our editorial office in conditional, type in A4, consist of 4000-5000 words in *Turabian Style* formatting.

Pengaruh Serangan 9/11 terhadap Perkembangan Dinamika Keamanan Internasional

Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani*
Bayupurwaeka@gmail.com

Abstract

The 9/11 took place fifteen years ago yet still becoming one of the worst tragedies in American history. This also changed the face of international security. Before terrorist attack became headlines in all international news networks, states all over the world still concerned about conventional security where war could only conducted by states. Now, states especially western states need to face the challenge come from non-states threat. To see what changes the terrorist attack in New York brings to international security, here I will explain three major effects. The three effects are based on American Foreign Policy towards terrorism which was adopted by almost countries; the emergence of Global War on Terrorism, Regime Termination in Afghanistan and Iraq, and World Focus on Jihadist Movement by Al-Qaeda and ISIS. By using explanative method, these indicated variables will explain how 9/11 changed the face and the dynamic of international security.

Keywords: 9/11, terrorism, international security, regime termination, jihadist movement.

*Alumni Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Indonesia

Metode Penelitian

Dalam menulis jurnal yang berjudul “*Pengaruh Serangan 9/11 terhadap Perkembangan Terorisme dalam Kajian Keamanan Internasional*”, penelitian ini akan menggunakan metode Eksplanatif yang melihat isu ini berdasar pada variabel-variabel terkait. Berdasarkan pada judul jurnal, variabel-variabel yang ada adalah:

Variabel Dependent :

- perkembangan terorisme dalam dinamika keamanan internasional

Variabel Independent :

- serangan 9/11

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, berita, dan literatur yang bersangkutan. Data sekunder yang dikumpulkan melalui proses tinjauan pustaka akan diseleksi dan diklasifikasi berdasar pada pembahasan yang akan dilakukan pada sub topik selanjutnya.

Dalam menganalisis data digunakan teknik kualitatif, saya akan menjelaskan kedua variabel di atas dalam bentuk deskripsi dan analisis melalui kalimat maupun paragraf. Teknik analisis data ini adalah melalui tahapan pengumpulan data yang kemudian diseleksi dan diklasifikasi,

interpretasi data konsep dan kata kunci yang telah ditentukan.

Dalam menginterpretasi data konsep, variabel dependen dan independen digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan topik ini. Dalam variabel dependen, perkembangan terorisme sejak tragedi 9/11 menjadi semakin kuat yang membuat kebijakan luar negeri AS maupun negara lain menjadi semakin kontra terhadap gerakan terorisme.

Diskusi dan Analisis

Dalam melihat pengaruh fenomena 9/11 terhadap dinamika keamanan internasional, setidaknya ada tiga pengaruh paling krusial dalam kajian keamanan internasional. Ketiga dampak dari kejadian ini adalah munculnya deklarasi *Global War on Terror*, penghentian rezim di Afganistan dan Irak, serta fokus dunia terhadap Gerakan Jihad Al-Qaeda dan ISIS.

Deklarasi *Global War on Terror*

Kebijakan Luar Negeri AS dalam produk *War on Terror* dicetuskan dan diberlakukan oleh Pemerintahan Presiden AS, George W. Bush untuk memerangi aksi terorisme global sejak tahun 2001. Kebijakan WOT dianggap sebagai tantangan yang penting terhadap keamanan AS dan dunia. Kebijakan ini

berubah menjadi sebuah konsentrasi keamanan bagi negara lain, dimana serangan 9/11 mampu “menggetarkan” AS yang merupakan sebuah negara yang memiliki pengaruh luar biasa besar terhadap tatanan dunia. Meskipun hanya dilakukan oleh sebuah grup bersenjata yang mampu menggunakan sebuah pesawat untuk menghancurkan WTC dan menyerang pusat komando militer AS, dampak psikologis yang diberikan terhadap warga Amerika Serikat sangat besar.¹

Jargon Bush yang paling terkenal adalah, “*either you are with us, or you are with the terrorist*” membuat banyak negara bergabung dalam kampanye anti terorisme. WOT yang dideklarasikan oleh Bush menyebar keseluruh dunia, khususnya di negara-negara sekutu AS, yang membuat dunia seolah-olah berperang melawan “*Islamofacism*”.² Munculnya gerakan terorisme dari kelompok militan Islam, membuat dunia berpikir bahwa umat muslim adalah teroris, dan Islam adalah ancaman untuk dunia.

Usaha uniteral AS untuk isu terorisme dikembangkan oleh Presiden Bush dan memiliki prospek yang sangat baik untuk mempertahankan hegemoni AS

di dunia. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya AS sebagai pemimpin dalam misi pemberantasan terorisme di dunia oleh negara lain, tidak hanya negara sekutu, tetapi juga di luar sekutu. Negara-negara lain di dunia mengadopsi kebijakan WOT ke dalam kebijakan domestik maupun kebijakan dalam forum internasional, sebagai contohnya adalah *US-ASEAN Joint Declaration on Combatting Terrorism* yang dilakukan di Washington DC, tanggal 1 Agustus 2002.³

Kebijakan melawan aksi terorisme di dunia yang diinisiasi oleh AS dan kemudian diadopsi oleh banyak negara memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap hak-hak sipil. Mengatasnamakan perang melawan terorisme, beberapa organisasi kemanusiaan global memprediksi bahwa negara mementingkan keamanan nasionalnya tanpa mengindahkan kebebasan hidup warga negaranya.

Kampanye anti terorisme ini lebih menekankan pada usaha militer yang dianggap sebagai sebuah “ideologi” ketakutan dan represi yang mampu menciptakan lebih banyak musuh dan peningkatan kekerasan, dibandingkan sebagai usaha pencegahan aksi terror dan

¹Paul Rogers, “Terrorism,” in *Security Studies an Introduction*, ed. P.D. Williams (New York: Routledge, 2008), 172.

²*Loc.cit.*

³ US Department of State, “US-ASEAN Joint Declaration on Combating Terrorism,” US Department of State (2009) <http://2001-2009.state.gov/p/eap/rls/ot/12428.htm> (accessed March 29, 2014).

penguatan keamanan.⁴ Seperti yang sering dikatakan oleh Presiden Bush, bahwa perang melawan teroris merupakan “*just war*” atau perang yang adil, dimana Amerika harus melawan musuh eksternal negara tersebut, yang tidak lain adalah Al-Qaeda dibawah pimpinan Osama Bin Laden.⁵ Penerapan “*just war*” ini dilakukan melalui penyebaran ide-ide *counter terrorism* dan propaganda media untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. Namun dalam kenyataannya yang dilakukan bukan meng-*counter* terorisme melainkan pendudukan secara paksa (invasi) ke negara-negara yang dianggap sebagai sponsor gerakan terorisme seperti Afganistan dan Irak.

Penghentian Rezim di Afganistan dan Irak

Reaksi lain yang muncul dari pemerintah AS terkait isu terorisme adalah invasi militer ke Afganistan dan Irak. Kedua negara ini dianggap sebagai negara sponsor yang memberikan dukungan baik finansial maupun pelatihan kepada pelaku terorisme.⁶ Negara memberikan sponsor kepada gerakan terorisme untuk

mempertahankan legitimasi, sehingga rakyatnya akan sangat bergantung pada keamanan yang diberikan oleh negara.⁷ Dalam menghentikan dukungan Afganistan dan Irak terhadap gerakan terorisme, AS lebih menekankan pada aksi militer dibandingkan dengan menggunakan pendekatan *counter terrorism*. Sejak serangan 9/11, kampanye-kampanye militer AS untuk memerangi terorisme di Afganistan dan Irak menjadi fitur dominan dalam agenda keamanan internasional.⁸

Invasi militer pertama yang dilakukan di Afganistan oleh AS adalah pada Bulan Oktober 2001. Invasi ke Afganistan dilakukan berdasar pada *joint resolution* tanggal 18 September 2001 yang berisi, “*to authorize the use of United States Armed Forces against those responsible for the recent attacks launched against the United States*”.⁹ *Joint Resolution* merupakan justifikasi legal dari kebijakan AS untuk melakukan invasi militer ke negara-negara yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS.

Kelompok terorisme di Afganistan dikendalikan penuh oleh Taliban yang

⁴“Global Policy Website”, War on Terrorism, Global Policy (2004) www.globalpolicy.org/war-on-terrorism/ (accessed March 30, 2014).

⁵ Michel Chossudovsky, “Al-Qaeda and the War on Terrorism”, Global Policy Article (2004) <http://www.globalpolicy.org/component/content/article/154/26821.html> (accessed March 30, 2014).

⁶ Paul Rogers, *op.cit.*, 174.

⁷*Loc.cit.*

⁸*Ibid.*, 178.

⁹The US Government Printing Office, “Joint Resolution,” Public Law 107-40, 107th Congress (2001) <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ40/html/PLAW-107publ40.htm> (accessed March 30, 2014).

dipimpin oleh Osama Bin Laden, dimana ia mensponsori secara penuh kebutuhan finansial dan perlengkapan militer kelompok ini dalam melakukan aksi terornya. Jaringan Al-Qaeda berhasil memperluas koneksi dan konspirasinya dalam melawan AS dan sekutunya tanpa mendapatkan hukuman atau sanksi atas tindakan terror yang dilakukan.¹⁰Invasi yang dilakukan di Afganistan merupakan puncak dari tanda-tanda dimana Bin Laden mulai kehilangan kontrol, koneksi, dan kekuatannya dalam melakukan serangan ke negara-negara barat. Bin Laden melarikan diri dari kepungan AS, dan berhasil lolos dari kampanye militer AS, yang membuat pertarungan terhadap terorisme belum berakhir.¹¹

Perlawanan terorisme AS terhadap Taliban Afganistan mendapat dukungan dari Inggris dimana kampanye militer pertama dilakukan dengan melakukan serangan bom melalui udara kepada angkatan bersenjata Taliban.¹²Selain dengan Inggris dan negara NATO lainnya, AS juga telah mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PGG 1378, mengenai

pembentukan pemerintahan yang baru di Afganistan.¹³ Langkah lain yang dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama militer dengan *Northern Alliance* Afganistan yang secara teknis merupakan lawan dari kelompok Taliban. *Northern Alliance* terlibat perang sipil di Afganistan dimana aliansi utara ini bermaksud untuk menghentikan rezim Taliban di Afganistan.¹⁴ Terminasi atau penghentian rezim Taliban yang dilakukan secara gencar oleh AS membuat pergerakan Al-Qaeda menjadi lebih lemah dan menyebar. Banyak pemimpin Taliban yang terbunuh, dan target utama AS yaitu Bin Laden terus menerus melarikan diri, sehingga banyak kota di Afganistan seperti Kabul mengalami kerusakan parah dan banyak warga sipil menjadi korban. Pengamat keamanan internasional melihat bahwa jika Afganistan berhasil mengganti kekuasaan Taliban dengan dukungan terhadap negara Barat, pengempuran terhadap Afganistan akan berangsur-angsur berkurang.¹⁵

¹⁰ Daniel Benjamin and Aidan Kirby, *The Evolving Threat of Terrorism, in Five Years After 9/11: an Assessment of America's War on Terror*, ed. J. Smith and T. Sanderson (Washington DC: CSIS, 2006), 1.

¹¹ *Loc. cit.*

¹² "Council on Foreign Relations", *US War in Afghanistan*, Council on Foreign Relations (2001) <http://www.cfr.org/afghanistan/us-war-afghanistan/p20018> (accessed March 30 2014).

¹³ US Department of States, "United Nations Security Council Resolution 1378," US Department of States (2001)

<http://www.state.gov/j/ct/rls/other/un/6138.htm> (accessed May 2 2016).

¹⁴ The International Relations and Security Network, "The War on Terror: Year Seven," The International Relations and Security Network (2007)

<http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?lng=en&id=51870> (accessed March 30, 2014).

¹⁵ *Loc. cit.*

Dan dalam waktu tiga bulan, tepatnya akhir tahun 2001, Pemerintahan Bush mengklaim kesuksesan besar melawan rezim Taliban, namun yang terjadi, kondisi domestik di Afganistan menjadi lebih buruk. Meskipun rezim Taliban berhasil diterminasi, bukan berarti rezim ini berhasil dimusnahkan. Anggota Taliban menyebar di pelosok Afganistan dan mendapat dukungan dari kelompok ekstrimis Islam di seluruh dunia. Kelompok Taliban yang berjumlah kecil mulai menciptakan terror di Kabul yang menyebabkan banyak warga sipil menjadi korban. Hal ini membuat dukungan terhadap AS di Afganistan mulai berkurang, khususnya dari Eropa karena AS dianggap menggunakan kebijakan WOT sebagai pelanggaran HAM dan pendudukan paksa atas wilayah-wilayah di Afganistan.¹⁶

Setelah Pemerintahan Bush gagal memperpanjang kebijakan WOT di Afganistan, Bush mulai mengembangkan *pre-emptive military actions* di negara-negara "*axis of evil*" dimana salah satunya adalah Irak. *Pre-emptive military actions* dilakukan melalui serangan udara dan darat yang dipersenjatai dengan lengkap dan kuat untuk melakukan terminasi

rezim Saddam Hussein.¹⁷ Saat Bush mulai melakukan strategi *pre-emptive* di Irak, Afganistan seolah-olah menjadi "*the forgotten war*" bagi Pemerintahan Bush.¹⁸

Dalam melakukan invasi ke Irak dalam rangka menghentikan rezim Saddam Hussein, Presiden Bush menggunakan justifikasi dimana Saddam Hussein secara terus menerus menentang Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai penghentian Operasi Gurun pada Perang Teluk tahun 1991.¹⁹ Selain itu, Bush melihat bahwa operasi militer yang dilakukan di Irak juga demi kepentingan "liberalisasi" masyarakat Irak yang dipimpin secara tidak demokratis oleh Saddam Hussein. Rezim Saddam Hussein dicurigai memiliki senjata pemusnah massal yang kemungkinan besar akan ditransfer kepada kelompok ekstrimis Islam khususnya pada kelompok-kelompok teroris. Sehingga Bush menganggap bahwa penghentian rezim Saddam Hussein merupakan langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran senjata pemusnah massal dan kelompok teroris di Timur Tengah.

Jika kita menapak tilas ke belakang, Irak dianggap sebagai ancaman bagi AS

¹⁶ Paul Rogers, "Disarmament Diplomacy," Acronym Reports No. 74 (December 2003) <http://www.acronym.org.uk/dd/dd74/74pr.htm> (accessed March 30, 2014).

¹⁷ *Loc. cit.*

¹⁸ Major James J. Handura, *Conflict Termination and Regime Change* (Kansas: School of Advanced Military Studies of United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, 2009), 27.

¹⁹ *Loc. cit.*

sejak invasi Irak ke Kuwait tahun 1990. Sebagai respon atas invasi Irak ke Kuwait, PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB 678 untuk mengeluarkan pasukan Irak di Kuwait.²⁰ Secara berkala AS mulai melakukan pengusiran tentara Irak dari Kuwait hingga Perang Teluk berakhir. Intervensi AS terhadap Irak berlanjut, dimana tahun 1991 AS mencurigai Irak memiliki senjata pemusnah massal yang membuat DK PBB mengeluarkan Resolusi 707 dan Resolusi 715 tahun 1991, Resolusi 1051 dan Resolusi 1060 tahun 1996, Resolusi 1115 dan 1134 tahun 1997, untuk melakukan pengontrolan atas pengembangan senjata nuklir yang ada di Irak.²¹ Pada tahun-tahun ini, meskipun Irak mengalami krisis akibat beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB, AS tidak bisa serta merta melakukan invasi militer ke Irak. Namun sejak isu terorisme mencuat, AS memiliki justifikasi untuk melakukan invasi ke negara ini.

Kecurigaan AS terhadap kepemilikan senjata pemusnah massal terhadap Irak hingga saat ini tidak terbukti. Tidak satupun senjata pemusnah massal ditemukan di Irak, namun kerusakan yang diakibatkan oleh AS

sangat tampak jelas. Bagi Bush, AS telah berhasil menghentikan rezim Saddam Hussein tahun 2003, dan menurut saya, invasi seharusnya segera dihentikan. Namun sampai saat ini, masih ada pasukan AS di Irak. Alasan yang muncul, seperti yang telah saya tulis sebelumnya, bahwa AS ingin membebaskan Irak dari pemimpin yang diktator dengan menerapkan demokrasi di negara ini. Selama proses demokratisasi dilakukan, pemberontakan dari masyarakat sipil Irak, maupun dari kelompok militan banyak dilakukan yang memakan banyak korban jiwa. Invasi AS mendapatkan banyak kritik dari dunia internasional, mulai dari pelanggaran HAM hingga penyelewengan atas pelaksanaan UN *Charter* dan Resolusi-Resolusi DK PBB.²² Akibat banyaknya kritik terhadap invasi AS ke Irak, Pemerintahan Presiden Obama telah berjanji secara berkala akan mengurangi pasukan AS di Irak dan di Timur Tengah secara umum. Setelah Rezim Saddam Hussein berhasil diterminasi dan invasi secara berkala dikurangi, Irak berubah menjadi negara yang pro AS dengan mulai melakukan pembukaan ekonomi terhadap pasar bebas,

²⁰ Kenneth Katzman, "Iraq: Former Regime Weapons Programs and Outstanding U.N. Issues," Congressional Research Service Report for Congress (2009) www.crs.org/RL32379/ (accessed March 31, 2014), 1.

²¹ *Ibid.*, (pp. 1-2).

²² CNN, "Hans Blix: Iraq War was a Terrible Mistake and Violation of UN Charter," (March 19, 2013) <http://edition.cnn.com/2013/03/18/opinion/iraq-war-hans-blix/> (accessed March 31, 2014).

meskipun masih memiliki regulasi yang minim.

Dampak Hegemoni AS: Gerakan Jihad Al-Qaeda dan ISIS Menjadi Fokus Dunia

Pergerakan Al-Qaeda menjadi sorotan dunia sejak kelompok ekstrimis Islam ini mengakui bahwa serangan di simbol penting kehidupan Bangsa Amerika yaitu WTC dan Pentagon merupakan aksi terror yang dilakukan oleh kelompoknya. Pergerakan Al-Qaeda tidak hanya mempengaruhi pergerakan terorisme yang lain (khususnya grup Islamis yang melakukan jihad), tetapi juga mempengaruhi keamanan manusia dan negara bahkan memberikan pengaruh kepada dunia.²³ Dalam kajian keamanan secara tradisional, yang bisa melakukan *political violence* hanyalah negara, karena negara merupakan aktor utama dalam politik dunia. Namun sejak munculnya gerakan terorisme Al-Qaeda yang membawa nilai-nilai radikal dalam Islam, para pengkaji keamanan melihat kelompok ini sebagai aktor yang penting dalam pergerakan kejahatan internasional.²⁴

Al-Qaeda merupakan organisasi muslim sunni yang radikal, dibentuk oleh Osama Bin Laden sekitar tahun 1980an. Sumber keuangan Al-Qaeda sendiri

didukung penuh oleh Osama Bin Laden, dimana ia merupakan milioner Timur Tengah yang memiliki banyak aset di luar negeri. Memiliki anggota sekitar 50.000 orang yang tersebar diseluruh dunia, Al-Qaeda memiliki jaringan di 65 negara di seluruh dunia yang beroperasi secara aktif.²⁵ Ada beberapa alasan mengapa Osama Bin Laden dan Al-Qaeda sangat menentang AS. Yang pertama, AS dianggap sebagai “kafir” yang pemerintahannya tidak sesuai dengan peraturan Islam Radikal, yang kedua karena AS mendukung negara-negara “kafir” di Timur Tengah seperti Israel, Mesir, dan Arab Saudi, dan yang ketiga karena keterlibatan AS pada Perang Teluk yang terjadi tahun 1991.²⁶ Sebagai bentuk penentangan terhadap pemerintahan AS, Osama Bin Laden mendeklarasikan “Jihad” atau “Perang Suci” dalam melawan AS.

Serangan 9/11 terhadap AS yang dilakukan Al-Qaeda merupakan klaim sebagai Jihad yang dilakukan oleh anggota kelompok dalam melawan negara “kafir”. Semenjak kejadian 9/11, Al-Qaeda

²⁵ START National consortium for the study of terrorism and respond to terrorism,” Terrorists Organization Profile: Al-Qaeda,” START National Consortium, http://www.start.umd.edu/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=6. (accessed March 31, 2014).

²⁶ Public Broadcasting Service,” Background: Al-Qaeda,” PBS, <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/network/alqaeda/indictment.html> (accessed March 31, 2014).

²³ Rogers, Paul, *op.cit.*, 172.

²⁴ *Loc.cit.*

dianggap sebagai sebuah organisasi religius transnasional yang memiliki pengaruh penting dalam Hubungan Internasional, khususnya dalam isu keamanan yang mampu mempengaruhi baik negara besar maupun negara lainnya di dunia dalam pengaturan tatanan dunia.²⁷ Al-Qaeda tidak hanya menyerang dan memberikan ancaman terhadap AS, tetapi juga pada seluruh dunia. Al-Qaeda banyak melakukan aksi terror di Timur Tengah, Pakistan, India, Eropa, bahkan beberapa sayap Al-Qaeda yang berkembang di Asia tenggara juga melakukan aksi terror (Bom Bali I dan II, Bom di Hotel JW Marriot, dan lain-lain).

Sebagai akibat dalam aksi terror yang mengatasnamakan Jihad, kelompok muslim radikal menjadi musuh dunia yang harus dihentikan. Pengadopsian kebijakan AS yaitu WOT mulai dilakukan banyak negara, yang diimplementasikan baik dalam level regional maupun nasional. Seperti yang telah saya tulis sebelumnya, bahwa ASEAN telah mengadopsi kebijakan *Combating Terrorism* sejak tahun 2001. Dalam kebijakan nasional, hampir semua negara di dunia serentak melakukan internalisasi kebijakan WOT dalam kebijakan domestik. Perancis, Jerman, dan Inggris, sekitar tahun 2010an,

memberlakukan larangan penggunaan Hijab dan atribut “ke-Islaman” di negara-negara tersebut, terkait dengan adanya ancaman terror bom yang dilakukan oleh Al-Qaeda dan kelompok Islam ekstrimis lainnya.

Pengejaran yang dilakukan AS dan sekutunya terhadap pimpinan Al-Qaeda yaitu Osama Bin Laden, membuahkan hasil tahun 2011. Sesuai yang diberitakan dalam CNN edisi 3 Mei 2011, sehari setelah presiden Obama mengumumkan secara resmi kematian Bin Laden, dunia langsung memberikan respon terhadap masalah ini. AS dan sekutunya menganggap ini sebagai pencapaian yang penting dalam penghentian aksi terorisme yang telah mengancam dunia. Negara-negara Islam seperti Afganistan mulai melakukan klarifikasi bahwa negara mereka bukanlah negara terorisme. Banyak negara mengklaim bahwa mereka bukan negara pendukung terorisme, dan akan terus berjuang untuk melakukan perlawanan terhadap aksi-aksi terorisme.

ISIS dan Gerakan Jihad Modern

Sebagai salah satu cabang dari Al-Qaeda, ISIS telah berkembang menjadi sebuah gerakan yang saat ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi keamanan di Timur Tengah dan belahan dunia lainnya. Sejarah pembentukan ISIS

²⁷Jeffrey Haynes, "Transnational Religious Actor and International Order," *Perspectives Journal* 17, No. 2 (2009), hal.43.

dimulai tahun 2004 di Irak saat Amerika menginvasi Irak dan perlawanan awal terjadi di wilayah Barat dimana wilayah ini merupakan wilayah Sunni yang kemudian menyebar ke wilayah timur Suriah.²⁸ Perkembangan yang cukup pesat ini terjadi akibat kekosongan kekuasaan di Irak paska berakhirnya Rezim Saddam Hussein. Selain itu, meningkatnya jumlah masyarakat Sunni yang terasing dalam bidang sosial dan politik serta ditariknya pasukan AS pada tahun 2001 membuat ISI (*Islamic State of Iraq*) memiliki pengaruh yang semakin kuat.

Meskipun telah terbukti bahwa ISIS adalah cabang dari Al-Qaeda, banyak ahli menyebutkan bahwa ISIS tidak sama dengan Al-Qaeda. ISIS bukan hasil atau bagian dari organisasi jihad yang lama dan bukan juga evolusi gerakan jihad.²⁹ ISIS merepresentasi ancaman jihad paska Al-Qaeda yang vakum akibat terbunuhnya Osama Bin Laden. Presiden AS, Barack Obama, menyatakan bahwa ISIS sepenuhnya merupakan organisasi teroris, namun banyak pihak yang menyangkal. Meskipun ISIS menggunakan taktik

terorisme, namun organisasi teroris tidak menguasai wilayah tertentu, hanya beranggotakan sedikit anggota, menyerang sipil, dan tidak secara langsung melakukan konfrontasi dengan militer.³⁰ Disisi lain, ISIS memiliki puluhan ribu pasukan, menguasai wilayah di Irak dan Suriah, meningkatkan kekuatan militer, mengontrol jalur komunikasi khususnya media sosial, menuntut pembangunan infrastruktur, *self-funding*, dan melakukan banyak operasi militer. Inilah alasan mengapa ISIS disebut sebagai *pseudo-state*, sebagian besar perilaku ISIS mencerminkan bagaimana negara bekerja.³¹

Kesuksesan yang dialami ISIS tahun 2014 memberikan “pukulan berat” bagi kebijakan luar negeri AS di Irak. Kebijakan luar negeri AS bertujuan untuk menciptakan negara Irak yang demokratis yang mampu melawan terorisme dan mampu menyediakan kemampuan administratif yang kuat³². Kebalikannya, Irak justru menjadi “sarang” terorisme yang paling ditakuti saat ini. Penambahan jumlah pasukan ISIS di Irak maupun di Suriah baik yang berasal dari Timur Tengah maupun luar Timur Tengah terjadi dengan sangat cepat. Awalnya AS hanya

²⁸“The Mair Amit Intelligence and Terrorism Information Center”, *ISIS: Portrait of a Jihadist Terrorist Organization*, (Tel Aviv: The Mair Amit Intelligence and Terrorism Information center, 2014), 1.

²⁹ Audrey Kurth Cronin, “ISIS is not a Terrorist Group”, *Foreign Affairs*, (March/April 2015) <https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/isis-not-terrorist-group> (accessed March 31, 2016).

³⁰*Loc. cit.*

³¹*Loc. cit.*

³² The Mair Amit Intelligence and Terrorism Information center, *op.cit.*, 9.

melihat pergerakan ISIS sebagai bentuk dari pemberontakan akibat rezimpemerintahan yang mengalami disintegrasi.³³

Tahun 2015 ISIS memulai gelombang penguasaan wilayah di Irak dan Suriah, khususnya di Kota Mosul di Irak yang merupakan pusat keuangan dimana kota ini mengatur regulasi pajak.³⁴ ISIS mulai menarik perhatian dunia saat ISIS mulai menggunakan media sosial seperti *Twitter* untuk melakukan perekrutan anggota baru di seluruh dunia. Selain itu, ISIS juga menyebarkan video dan berita mengenai kekejaman mereka terhadap tawanan mereka. Namun sejak Rusia bergabung dengan pemerintahan Assad di Suriah untuk memerangi pemberontak dan pejuang ISIS, ISIS mengalami kemunduran. Beberapa ahli keamanan internasional menganggap bahwa ISIS berperang pada peperangan yang akan dimenangkan oleh oposisi ISIS.³⁵

Meskipun banyak ahli menyatakan kemunduran ISIS, pengaruh ISIS pada kaum muslim di Eropa belum hilang. Tanggal 22 Maret 2016, serangan ISIS

kembali terjadi di Brussels yang menewaskan 30 orang dan ratusan orang terluka.³⁶ Setelah serangan di Brussels, pemerintah dunia terutama di Eropa dan AS mulai meningkatkan keamanan untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, menyatakan bahwa Barat harus menyerang ISIS di Irak, Suriah, dan Libya.³⁷ Tony Blair juga menambahkan bahwa negara barat harus membangun kapasitas militer tidak hanya berskala lokal tetapi juga berskala internasional yang mampu menjangkau semua teritori yang telah, sedang, dan akan dikuasai oleh ISIS.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa sejak 9/11 terjadi, gerakan Jihad dan terorisme akan tetap menjadi fokus dunia selama ancaman terhadap legitimasi negara dan rakyatnya masih terjadi.

Kesimpulan

Serangan 9/11 yang terjadi di New York memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam dinamika keamanan internasional. Terorisme bukan organisasi

³³*Loc.cit.*

³⁴ Michael Doyle, "Islamic State in Iraq and Syria Losing Ground: International Security Experts Discuss," Incident Management Group (January 12, 2016) <http://www.imgsecurity.net/islamic-state/> (accessed March 31, 2016).

³⁵*Loc.cit.*

³⁶*BBC News*, "Brussels Attack: Zaventem and Maelbeek Bombs Kill Many," *BBC News* (March 22, 2016) <http://www.bbc.com/news/world-europe-35869254> (accessed March 31, 2016).

³⁷ Nicholas Watt, "Tony Blair: West Must be Ready to Deploy Ground Troops against ISIS," *The Guardian* (March 27, 2016) <http://www.theguardian.com/politics/2016/mar/27/tony-blair-west-must-be-ready-to-deploy-ground-troops-against-isis> (accessed March 31, 2016).

³⁸*Loc.cit.*

yang baru dalam kajian keamanan. Namun terorisme yang disoroti sejak tragedi 9/11 merupakan organisasi teroris yang menggunakan ide-ide keagamaan dalam setiap aksinya. Al-Qaeda yang mengklaim telah melakukan serangan di WTC dan Pentagon menjadi aktor non-negara yang sangat penting dalam tatanan keamanan dunia. Al-Qaeda yang bersarang di Afganistan juga membawa dampak pada terminasi Rezim Taliban di Afganistan dan Rezim Saddam Hussein di Irak. Kedua akibat ini diawali dengan deklarasi *Global War on Terror* oleh Presiden Bush tahun 2001. Berkat kampanye kebijakan anti teror AS, dunia mulai menyoroti setiap pergerakan kelompok-kelompok muslim dan kawasan Timur Tengah yang dianggap *axis* dari perkembangan gerakan terorisme. Sejak kejadian ini, dunia mulai semakin menyadari bahwa keamanan internasional tidak hanya dibentuk oleh aktor-aktor negara, tetapi juga oleh aktor non-negara yang memiliki pengaruh besar dalam pengaturan tatanan dunia.

Akibat lain yang ditimbulkan akibat munculnya jargon *war on terror* dan penjatuhan rezim di Irak dan Afganistan adalah munculnya gerakan jihad modern yang mulai mengubah metode penyerangan. Dalam organisasi terorisme konvensional seperti Al-Qaeda, jumlah anggota sangat terbatas dan menyerang

simbol-simbol negara dan membawa pesan politis. Munculnya ISIS memberikan wajah baru pada organisasi teroris yang membawa jihad sebagai ideologi. ISIS mulai merekrut puluhan ribu anggota di seluruh dunia, menyerang sipil, menguasai wilayah teritori tertentu, serta memiliki kapabilitas militer yang menyerupai militer negara. Penyebaran paham ISIS ke seluruh dunia sangat cepat yang didukung penuh oleh teknologi informasi. Hal ini menyerukan bahwa peran pemerintah di seluruh dunia sangat dibutuhkan untuk membendung pengaruh ISIS guna meningkatkan keamanan nasional yang kemudian akan berdampak pada keamanan internasional.

Peristiwa 9/11 yang terjadi tahun 2001 di New York, Amerika Serikat telah mempengaruhi kajian keamanan internasional. Serangan 9/11 yang terjadi di titik-titik penting kehidupan Bangsa Amerika yaitu *World Trade Center* dan Pentagon, menjadi indikasi bahwa sasaran dari aksi terror ini memang ditujukan untuk kepentingan politik.

Daftar Pustaka

- BBC News, "Brussels Attack: Zaventem and Maelbeek Bombs Kill Many," BBC News (March 22, 2016) <http://www.bbc.com/news/world-europe-35869254> (accessed March 31, 2016).
- Benjamin, Daniel, and Aidan Kirby, *The Evolving Threat of Terrorism, In Five Years After 9/11: an Assessment of America's War on Terror*, edited by J. Smith & T. Sanderson, 1-6. Washington DC: CSIS, 2006.
- Chossudovsky, Michel, "Al-Qaeda and the 'War on Terrorism,'" *Global Policy* (2004) <http://www.globalpolicy.org/component/content/article/154/26821.html> (accessed March 30, 2014).
- CNN, "World Leaders React to News of Bin Laden's Death," CNN (May 3, 2011) <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.world.reacts/> (accessed March 31, 2014).
- CNN, "Hans Blix: Iraq War was a Terrible Mistake and Violation of UN Charter," CNN (March 19, 2013) <http://edition.cnn.com/2013/03/18/opinion/iraq-war-hans-blix/> (accessed March 31, 2014).
- Council on Foreign Relations, "US War in Afghanistan," CFR (2001) <http://www.cfr.org/afghanistan/us-war-afghanistan/p20018> (accessed March 30, 2014).
- Cronin, Audrey Kurth, "ISIS is not a Terrorist Group", *Foreign Affairs*, (March/April 2015), <https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/isis-not-terrorist-group> (accessed March 31, 2016).
- Doyle, Michael, "Islamic State in Iraq and Syria Losing Ground: International Security Experts Discuss," *Incident Management Group* (January 12, 2016) <http://www.imgsecurity.net/islamic-state/> (accessed March 31, 2016).
- Global Policy, "War on Terrorism," *Global Policy* (2004) www.globalpolicy.org/war-on-terrorism/ (accessed March 30, 2014).
- Handura, Major James J. *Conflict Termination and Regime Change*. Kansas: School of Advanced Military Studies of United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, 2009.
- Haynes, Jeffrey, "Transnational Religious Actor and International Order," in *Perspectives Journal*, Vol. 17, No. 2 (2009): 43-69.

- Katzman, Kenneth,” Iraq: Former Regime Weapons Programs and Outstanding U.N Issues,” in Congressional Research Service Report for Congress (2009) www.crs.org/RL32379/ (accessed March 31, 2014).
- Public Broadcasting Service,” Background: Al-Qaeda,” PBS, <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/network/alqaeda/indictment.html> (Accessed March 31, 2014).
- Rogers, Paul,” Disarmament Diplomacy,” in Acronym Reports No. 74 (December, 2003) <http://www.acronym.org.uk/dd/dd74/74pr.htm> (accessed March 30, 2014).
- Rogers, Paul. “Terrorism.” In Security Studies an Introduction, edited by P.D. Williams, New York: Routledge, 2008.
- START National consortium for the study of terrorism and respond to terrorism,” Terrorists Organization Profile: Al-Qaeda,” START, http://www.start.umd.edu/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=6 (accessed March 31, 2014).
- The International Relations and Security Network,” The War on Terror: Year Seven,” The International Relations and Security Network (2007)<http://www.isn.ethz.ch/Digital>
- Library/Articles/Detail/?lng=en&id=51870 (accessed March 30, 2014).
- The Mair Amit Intelligence and Terrorism Information center. ISIS: Portrait od a Jihadi Terrorist Organization. Tel Aviv: The Mair Amit Intelligence and Terrorism Information center, 2014.
- The US Government Printing Office,” Joint Resolution,” in public law 107-40, 107thCongress (2001) <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ40/html/PLAW-107publ40.htm> (accessed March 30, 2014).
- US Department of State,” US-ASEAN Joint Declaration on Combatting Terrorism,” US Department of State (2009) <http://2001-2009.state.gov/p/eap/rls/ot/12428.htm> (accessed March 29, 2014).
- Watt, Nicholas,” Tony Blair: West Must be Ready to Deploy Ground Troops against ISIS,” The Guardian (March 27, 2016) <http://www.theguardian.com/politics/2016/mar/27/tony-blair-west-must-be-ready-to-deploy-ground-troops-against-isis> (accessed March 31, 2016).